

ABSTRAK

Praktik parkir pada badan jalan di kawasan Jalan Sengeda, Kota Takengon, masih sering ditemukan dan menyebabkan kemacetan, mengganggu kelancaran lalu lintas, serta berpotensi menimbulkan gangguan keselamatan pengguna jalan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan penertiban parkir belum berjalan secara optimal meskipun Pemerintah Aceh Tengah telah menetapkan Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 43 Tahun 2022 tentang tata cara parkir dan sanksi administratif bagi pelanggaran parkir. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan penertiban parkir liar yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Takengon serta menganalisis faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya. Faktor-faktor penghambatnya berdasarkan kerangka *context of implementation* Grindle, untuk memahami tantangan nyata di lapangan. Kemudian, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan penertiban parkir liar oleh Dinas Perhubungan Kota Takengon di kawasan Jalan Sengeda, yang difokuskan pada upaya pencegahan parkir di lokasi terlarang, pengendalian kemacetan lalu lintas, serta penanganan gangguan keselamatan pengguna jalan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari pihak Dinas Perhubungan, Satpol PP dan WH Aceh Tengah, juru parkir, serta masyarakat pengguna jasa parkir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penertiban parkir liar dilakukan melalui pengawasan dan pengendalian parkir oleh Dinas Perhubungan, penertiban kendaraan yang parkir di area terlarang, pemberian arahan oleh juru parkir kepada pengguna kendaraan. Selain itu, terdapat dukungan koordinasi antara Dinas Perhubungan dan Satpol PP dalam menjaga ketertiban parkir di kawasan Jalan Sengeda, Kota Takengon. Meskipun demikian, implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi berbagai hambatan dalam pelaksanaannya. Hambatan tersebut meliputi keterbatasan kapasitas lahan parkir yang menyebabkan penggunaan badan jalan sebagai lokasi parkir, rendahnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi aturan parkir, perilaku pengendara yang lebih mengutamakan kenyamanan dan kemudahan akses dibandingkan kepatuhan terhadap ketentuan parkir, serta masih adanya pengendara yang menghindari pembayaran retribusi parkir dengan memarkir kendaraan di area yang tidak diperuntukkan sebagai lokasi parkir. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penambahan dan penataan lahan parkir yang lebih terpusat, peningkatan pengawasan dan penertiban di lapangan, sehingga tercipta ketertiban dan kelancaran lalu lintas di Kota Takengon.

Kata Kunci: implementasi kebijakan, parkir liar, Dinas Perhubungan, ketertiban lalu lintas, Jalan Sengeda.

ABSTRACT

Illegal parking practices on road shoulders in the Jalan Sengeda area, Takengon City, are still frequently found and have caused traffic congestion, disrupted traffic flow, and potentially endangered road users' safety. This condition indicates that parking control implementation has not been carried out optimally, even though the Government of Central Aceh Regency has established Regent Regulation Number 43 of 2022 concerning parking procedures and administrative sanctions for parking violations. This study aims to examine the implementation of the illegal parking control policy carried out by the Department of Transportation of Central Aceh Regency and to analyze the supporting and inhibiting factors in its implementation. The inhibiting factors are analyzed based on Grindle's context of implementation framework in order to understand the actual challenges faced in the field. Furthermore, this study focuses on efforts to prevent parking in prohibited areas, control traffic congestion, and address traffic safety disturbances in the Jalan Sengeda area, Takengon City. This research employed a qualitative approach with a descriptive method. Data collection techniques were conducted through observation, interviews, and documentation. The research informants consisted of officials from the Department of Transportation, the Civil Service Police Unit (Satpol PP and WH Aceh Tengah), parking attendants, and community members using parking services. The results of the study show that the implementation of the illegal parking control policy was carried out through parking supervision and control by the Department of Transportation, enforcement against vehicles parked in prohibited areas, directions given by parking attendants to vehicle users, and plans for expanding and reorganizing parking areas using an angled parking system to improve orderliness and parking capacity. In addition, there was coordination support between the Department of Transportation and Satpol PP in maintaining parking order in the Jalan Sengeda area, Takengon City. However, the implementation of the policy still faces several obstacles. These obstacles include limited parking capacity, which causes the use of road shoulders as parking areas, low public awareness in complying with parking regulations, motorists' behavior that prioritizes convenience and accessibility over compliance with parking rules, This study recommends the need for additional and more centralized parking areas, increased supervision and enforcement in the field, regulations in order to create traffic order and smooth traffic flow in Takengon City.

Keywords: policy implementation, illegal parking, Department of Transportation, traffic order, Jalan Sengeda.